



WALI KOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PONTIANAK
NOMOR 896 /DPMPTSP/TAHUN 2022

TENTANG

JENIS PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG
DILIMPahkan KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PONTIANAK

WALI KOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Wali Kota Nomor 48 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak, menyatakan bahwa jenis pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilimpahkan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Jenis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Dilimpahkan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi Bertujuan Sebagai Pedoman Dalam Penyelenggaraan Usaha Jasa Konstruksi Berupa Jasa Konsultansi Konstruksi, Pekerjaan Konstruksi, dan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dan Rujukan Dalam Rangka Kegiatan Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
25. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
26. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2009 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Obat Hewan;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah;
29. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner;
30. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 270);

31. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 267);
32. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 283);
33. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Usaha Pengolahan Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 59);
34. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 266);
35. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 269);
36. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 301);
37. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 323);
38. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Konstruksi Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 306);
39. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 312);
40. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 257);

41. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 316);
42. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 262);
43. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Interkontinental (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 493);
44. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung Fungsi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 312);
45. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 279);
46. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 282);
47. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal;
48. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 192);
49. Peraturan Wali Kota Nomor 59 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2011 Nomor 59);
50. Peraturan Wali Kota Nomor 21 Tahun 2015 tentang Rumah Susun di Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2015 Nomor 21);
51. Peraturan Wali Kota Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2022 Nomor 8);

52. Peraturan Wali Kota Nomor 48 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2022 Nomor 48);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Jenis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Dilimpahkan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak.
- KEDUA** : Jenis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA** : Pada saat Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku, Keputusan Wali Kota Nomor 286.1/DPMPSTP/Tahun 2022 tentang Pejabat Penandatanganan Dalam Rangka Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kota Pontianak dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 4 Oktober 2022



WALI KOTA PONTIANAK,


EDI RUSDI KAMTONO

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALI KOTA PONTIANAK
 NOMOR 896/DPMPSTP/TAHUN 2022
 TENTANG JENIS PELAYANAN PERIZINAN DAN
 NON PERIZINAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
 TERPADU SATU PINTU KOTA PONTIANAK

JENIS PELAYANAN PERIZINAN

NO.	JENIS PELAYANAN PERIZINAN KOTA PONTIANAK	LEMBAGA/PERANGKAT DAERAH YANG MELIMPAHKAN	PEJABAT PENANDATANGAN
1.	Persetujuan Bangunan Gedung	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.	Nomor Induk Berusaha	Online Single Submission	Online Single Submission
3.	Sertifikat Standar	Online Single Submission	Online Single Submission
4.	Izin Usaha	Online Single Submission	Online Single Submission
5.	Sertifikat Perizinan Berusaha Untuk Mendukung Kegiatan Usaha	Online Single Submission	Online Single Submission
6.	Surat Izin Praktek Tenaga Kesehatan Tradisional	Dinas Kesehatan	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
7.	Surat Terdaftar Penyehat Tradisional	Dinas Kesehatan	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
8.	Surat Izin Praktek Dokter	Dinas Kesehatan	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
9.	Surat Izin Praktek Dokter Spesialis	Dinas Kesehatan	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
10.	Surat Izin Praktek Dokter Gigi	Dinas Kesehatan	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
11.	Surat Izin Praktek Dokter Gigi Spesialis	Dinas Kesehatan	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
12.	Surat Izin Kerja Audiologi	Dinas Kesehatan	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
13.	Surat Izin Praktek Tenaga Teknis Fisioterapi	Dinas Kesehatan	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
14.	Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Fisioterapi	Dinas Kesehatan	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
15.	Surat Izin Kerja Radiografer	Dinas Kesehatan	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

16.	Surat Izin Kerja Perawat	Dinas Kesehatan	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
17.	Surat Izin Praktek Perawat	Dinas Kesehatan	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
18.	Surat Izin Praktek Ahli Tehnologi Laboratorium Medik	Dinas Kesehatan	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
19.	Surat Izin Kerja Terapis Gigi dan Mulut	Dinas Kesehatan	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
20.	Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien	Dinas Kesehatan	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
21.	Surat Izin Kerja Sanitarian	Dinas Kesehatan	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
22.	Surat Izin Praktek Bidan	Dinas Kesehatan	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
23.	Surat Izin Kerja Tenaga Gizi	Dinas Kesehatan	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
24.	Surat Izin Praktek Tenaga Gizi	Dinas Kesehatan	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
25.	Surat Izin Praktek Terapi Wicara	Dinas Kesehatan	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
26.	Surat Izin Kerja Terapis Wicara	Dinas Kesehatan	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
27.	Surat Izin Praktek Okupasi Terapis	Dinas Kesehatan	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
28.	Surat Izin Kerja Okupasi Terapis	Dinas Kesehatan	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
29.	Surat Izin Praktek Ortotis Prostetis	Dinas Kesehatan	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
30.	Surat Izin Kerja Ortotis Prostetis	Dinas Kesehatan	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
31.	Surat Izin Kerja Perekam Medis	Dinas Kesehatan	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
32.	Surat Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian	Dinas Kesehatan	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
33.	Surat Izin Praktek Apoteker	Dinas Kesehatan	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
34.	Surat Izin Praktek Elektromedis	Dinas Kesehatan	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

35.	Surat Izin Kerja Tenaga Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
36.	Surat Izin Kerja Tenaga Psikolog	Dinas Kesehatan	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
37.	Surat Izin Kerja Tenaga Teknisi Transfusi Darah	Dinas Kesehatan	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
38.	Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
39.	Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



WALI KOTA PONTIANAK,

[Handwritten Signature]
 EDI RUSDI KAMTONO

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN WALI KOTA PONTIANAK
 NOMOR 896/DPMPSTP/TAHUN 2022
 TENTANG JENIS PELAYANAN PERIZINAN DAN
 NON PERIZINAN YANG DILIMPahkan KEPADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
 TERPADU SATU PINTU KOTA PONTIANAK

JENIS PELAYANAN NON PERIZINAN

NO.	JENIS PELAYANAN NON PERIZINAN KOTA PONTIANAK	LEMBAGA/PERANGKAT DAERAH YANG MELIMPahkan	PEJABAT PENANDATANGAN
1.	Penerbitan Nomor Pokok Sekolah Nasional	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.	Pelayanan Rekomendasi Untuk Pengaktifan Izin Pendirian Lembaga Pendidikan yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3.	Pencabutan Surat Izin Praktek Tenaga Kesehatan Tradisional	Dinas Kesehatan	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4.	Pencabutan Surat Terdaftar Penyehat Tradisional	Dinas Kesehatan	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5.	Pencabutan Surat Izin Praktek Dokter	Dinas Kesehatan	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
6.	Pencabutan Surat Izin Praktek Dokter Spesialis	Dinas Kesehatan	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
7.	Pencabutan Surat Izin Praktek Dokter Gigi	Dinas Kesehatan	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
8.	Pencabutan Surat Izin Praktek Dokter Gigi Spesialis	Dinas Kesehatan	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
9.	Pencabutan Surat Izin Kerja Audiologi	Dinas Kesehatan	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
10.	Pencabutan Surat Izin Praktek Tenaga Teknis Fisioterapi	Dinas Kesehatan	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
11.	Pencabutan Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Fisioterapi	Dinas Kesehatan	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
12.	Pencabutan Surat Izin Kerja Radiografer	Dinas Kesehatan	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
13.	Pencabutan Surat Izin Kerja Perawat	Dinas Kesehatan	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

14.	Pencabutan Surat Izin Praktek Perawat	Dinas Kesehatan	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
15.	Pencabutan Surat Izin Praktek Ahli Tehnologi Laboratorium Medik	Dinas Kesehatan	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
16.	Pencabutan Surat Izin Kerja Terapis Gigi dan Mulut	Dinas Kesehatan	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
17.	Pencabutan Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien	Dinas Kesehatan	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
18.	Pencabutan Surat Izin Kerja Sanitarian	Dinas Kesehatan	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
19.	Pencabutan Surat Izin Praktek Bidan	Dinas Kesehatan	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
20.	Pencabutan Surat Izin Kerja Tenaga Gizi	Dinas Kesehatan	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
21.	Pencabutan Surat Izin Praktek Tenaga Gizi	Dinas Kesehatan	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
22.	Pencabutan Surat Izin Praktek Terapi Wicara	Dinas Kesehatan	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
23.	Pencabutan Surat Izin Kerja Terapis Wicara	Dinas Kesehatan	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
24.	Pencabutan Surat Izin Praktek Okupasi Terapis	Dinas Kesehatan	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
25.	Pencabutan Surat Izin Kerja Okupasi Terapis	Dinas Kesehatan	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
26.	Pencabutan Surat Izin Praktek Ortotis Prostetis	Dinas Kesehatan	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
27.	Pencabutan Surat Izin Kerja Ortotis Prostetis	Dinas Kesehatan	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
28.	Pencabutan Surat Izin Kerja Perekam Medis	Dinas Kesehatan	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
29.	Pencabutan Surat Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian	Dinas Kesehatan	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
30.	Pencabutan Surat Izin Praktek Apoteker	Dinas Kesehatan	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
31.	Pencabutan Surat Izin Praktek Elektromedis	Dinas Kesehatan	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
32.	Pencabutan Surat Izin Kerja Tenaga Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

33.	Pencabutan Surat Izin Kerja Tenaga Psikolog	Dinas Kesehatan	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
34.	Pencabutan Surat Izin Kerja Tenaga Teknisi Transfusi Darah	Dinas Kesehatan	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
35.	Rekomendasi Galian Kabel	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
36.	Persetujuan Jembatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
37.	Surat Keterangan Peil Banjir	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



 WALI KOTA PONTIANAK,

 EDI RUSDI KAMTONO